

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2015-2018**

**ANALYSIS OF ORIGINAL REVENUE INCOME AND BALANCE FUNDS ON  
FINANCIAL PERFORMANCE OF GOVERNMENT OF THE DISTRICT AND CITY IN  
WEST JAVA PROVINCE, 2015-2018**

Intan Layuk Lebang<sup>1</sup>, Sri Rahayu., S.E., M.Ak., Ak., CA <sup>2</sup>

1,2 Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>accintanlebang@student.telkomuniversity.ac.id <sup>2</sup>srirahayu@telkomuniversity.ac.id

**Abstrak:**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk membandingkan kesesuaian antara tujuan dengan implementasi keberhasilan program pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan maupun secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari visualisasi APBD pada situs Kementerian Keuangan.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 52 sampel penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dan menggunakan aplikasi *Eviews 10*.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini. Diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan mengevaluasi penetapan Anggaran Pendapatan Asli Daerah agar lebih sesuai dengan kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**Abstract:**

*Local government's financial performance is an overview of the level of achievement of local governments in conducting financial management. The measurement of local government's financial performance is crucial to compare the suitability between objectives and the success implementation of government programs. Government financial performance can be measured using effectiveness ratios, efficiency ratios and regional financial independence ratios.*

*This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenues and Balancing Funds simultaneously and partially on the Financial Performance of District and City Governments in West Java Province in 2015-2018. The data used in this study were obtained from the APBD visualization on the Ministry of Finance website.*

*This study used purposive sampling and obtained 52 research samples. Analysis of the data used in this study is panel data regression analysis and using the Eviews 10 application.*

*Based on the results of the study, the variable Local Revenue and Balancing Fund simultaneously affect the Government's Financial Performance. Partially, the variable Local Revenue has a positive effect on Government Financial Performance. The Balancing Fund has a negative effect on the Government's Financial Performance.*

*For further research, it is expected to add other variables that have not been used in this study. It is expected that the Regency and City Governments in West Java Province can maximize Regional Original Revenue and evaluate the determination of the Regional Original Revenue Budget to better suit the region's ability to realize Regional Original Revenues.*

*Keywords: Local revenue, Balance fund, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Financial Independence Ratio, Regional Government Financial Performance.*

## 1. Pendahuluan

Kinerja Keuangan Pemerintah adalah tingkat pencapaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditentukan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran<sup>[1]</sup>. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah penting dilakukan mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap sektor publik. Selain itu, penilaian kinerja keuangan pemerintah juga penting dilakukan karena penerapan otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara mandiri, hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembangunan.<sup>[2]</sup>

Realisasi total pendapatan tertinggi se-provinsi di Indonesia tahun 2017 adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai 116,99 Triliun Rupiah. Provinsi Jawa Barat lebih unggul dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dan dianggap mampu mengelola pemerintahan dengan jumlah Dana Perimbangan relatif kecil dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.<sup>[3]</sup>

**Tabel 1.1**

### **10 Tertinggi Realisasi Total Pendapatan Se-Provinsi di Indonesia Tahun 2017 (Dalam Triliun Rupiah)**

No.	Nama Daerah	Jumlah
1	Provinsi Jawa Barat	116,99
2	Provinsi Jawa Timur	115,65
3	Provinsi Jawa Tengah	98,31
4	Provinsi DKI Jakarta	64,82
5	Provinsi Sumatera Utara	53,43
6	Provinsi Papua	49,26
7	Provinsi Aceh	44,80
8	Provinsi Sulawesi Selatan	35,80
9	Provinsi Sumatera Selatan	35,39
10	Provinsi Banten	32,59

Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat pertama realisasi total pendapatan se-provinsi di Indonesia. Adapun rincian realisasi pendapatan tersebut berasal dari 50,28% Dana Perimbangan, 35,05% Pendapatan Asli Daerah, dan 14,67% Pendapatan Lain-lain. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada peringkat kedua, Dana Perimbangan yang diperoleh Provinsi Jawa Timur adalah 54,93% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 32,22%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat apabila dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dan Dana Perimbangan yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja Keuangan Pemerintah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah<sup>[4]</sup>. Kinerja Keuangan Pemerintah dapat diukur menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi<sup>[5]</sup>.

Rasio Efektivitas diperoleh dari pembagian antara Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah<sup>[6]</sup> (Suranta dkk, 2018). Pemerintah Daerah dikatakan efektif dalam mengelola keuangan jika rasio efektivitas mencapai nilai lebih dari 100% (Ayu Puspita, 2018). Rasio Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Suatu daerah dikategorikan efisiensi dalam mengelola keuangan apabila rasio efisiensi di bawah 100% (Nugroho, 2018). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, berarti daerah dianggap semakin mampu membiayai pembangunannya sendiri (Ayu Puspita, 2018)

## 2. Dasar Teori

### 2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah adalah tingkat pencapaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditentukan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran<sup>[1]</sup>. Pengukuran kinerja keuangan merupakan cerminan dalam penilaian akuntabilitas serta kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah<sup>[7]</sup>

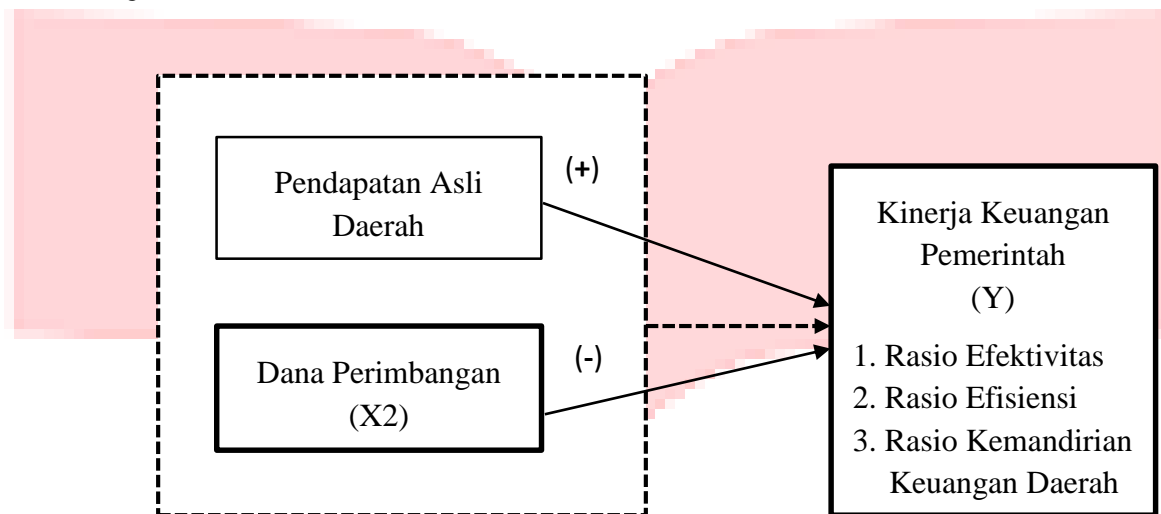
### 2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Pendapatan Asli Daerah untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi<sup>[8]</sup>

### 2.4 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat<sup>[9]</sup>. tujuan Dana Perimbangan adalah untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.<sup>[10]</sup>

### 2.5 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

-----> : Pengaruh secara simultan

————> : Pengaruh secara parsial

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

### 2.6 Hipotesis Penelitian

H1: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

H2: Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

H3: Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan

### 2.7 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah 27 Kabupaten Kota.

### 2.8 Sampel

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik sampel *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel adalah Laporan Keuangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat yang telah di audit.

### 2.9 Teknik Analisis

Teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2), dan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y1) menggunakan analisis regresi data panel.

## 3. Analisis dan Pembahasan

### 3.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	Pendapatan Asli Daerah (Ln)	Dana Perimbangan (Ln)	Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Kemandirian (%)	Kinerja Keuangan (%)
MEAN	27.1847	27.9445	109,83	99,83	181,31	130,32
MEDIAN	27.1125	27.9605	113,68	99,51	156,12	126,43
MAXIMUM	28.7434	28.7745	177,88	113,13	549,25	254,79
MINIMUM	25.4782	26.7824	50,17	87,39	44,36	72,90
Std. Dev	0.8642	0.5317	25,25	5,32	114,61	39,88
Observation	52	52	52	52	52	52

Sumber : Eviews 10

Tabel di atas merupakan hasil analisis statistik deskriptif. Dari keseluruhan variabel dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masing-masing variabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata pada masing-masing variabel. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini bersifat tidak bervariasi atau mengelompok.

3.2 Analisis Regresi Data Panel

Hasil analisis regresi linier data panel dalam penelitian ini menghasilkan persamaan regresi data panel sebagai berikut :

Dependent Variable: KK  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 12/26/19 Time: 07:13  
 Sample: 2015 2018  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 13  
 Total panel (balanced) observations: 52  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	412.8911	256.1688	1.611793	0.1134
PAD	28.27857	7.390269	3.826461	0.0004
DP	-37.62130	12.95084	-2.904932	0.0055

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		17.92625	0.2722
Idiosyncratic random		29.30952	0.7278

Weighted Statistics			
R-squared	0.227627	Mean dependent var	82.48763
Adjusted R-squared	0.196101	S.D. dependent var	32.95169
S.E. of regression	29.54462	Sum squared resid	42771.33
F-statistic	7.220419	Durbin-Watson stat	1.868960
Prob(F-statistic)	0.001786		

$$Y = 412.8911 + 28.27857PAD - 37.62130DP + \epsilon$$

Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai positif 412.8911 menunjukkan bahwa apabila variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan bernilai nol, maka Kinerja Keuangan adalah sebesar 412.8911. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak terdapat variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan maka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018 memperoleh Kinerja Keuangan sebesar 412.8911.
2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bernilai positif 28.27857 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol, maka Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat akan meningkat sebesar 28.27857. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Kinerja Keuangan akan meningkat. 3. Koefisien regresi Dana Perimbangan bernilai negatif 37.62130 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Dana Perimbangan dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol, maka Kinerja Keuangan akan menurun sebesar 37.62130. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan mengalami penurunan, maka Kinerja Keuangan akan meningkat. Sebaliknya apabila Dana Perimbangan meningkat, maka Kinerja Keuangan akan mengalami penurunan.

### 3.3 Pengujian Hipotesis

#### 1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2015:268). Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Square* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,196101 atau 19,61%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018 sebesar 19,61%, sedangkan sisanya yaitu 80,39% dipengaruhi oleh variabel lain.

#### 2. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai *prob (F static)* adalah sebesar 0,001786, lebih kecil dari 0,05. Sehingga, berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018.

#### 3. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

a. Nilai *probability (t-statistic)* Pendapatan Asli Daerah adalah 0,0004. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Adapun *t-statistic* bernilai positif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

b. Nilai *probability (t-statistic)* Dana Perimbangan adalah 0,0055. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Adapun *t-statistic* bernilai negatif menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang dipaparkan pada poin 3, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan atau secara bersama-sama, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018. Hal ini ditunjukkan dengan hasil Uji Simultan pada Tabel 4.10 bahwa nilai probabilitas  $0,001786 < 0,05$ , sehingga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018. Hal ini ditunjukkan dengan hasil Uji Parsial, nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar  $0,0004 < 0,05$
3. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018.

### 4.2 Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel lain dan menambah periode penelitian sehingga diharapkan penelitian tersebut mampu menjelaskan lebih banyak variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, sebaiknya melakukan evaluasi sebelum menetapkan anggaran Pendapatan Asli Daerah, hal ini karena ditemukannya daerah yang

selama periode penelitian secara berturut-turut belum mampu mencapai realisasi. Selain itu, diharapkan Pemerintah mampu mengalokasikan Dana Perimbangan dengan mempertimbangkan daerah yang belum mampu mencapai Pendapatan Asli Daerah yang maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] <http://bpkad.banjarkab.go.id>
- [2] Antari, N. P., Meriyani, H., & Suena, N. M. D. (2019). (Communication Factors That Influence The Trust Level Toward, 5(2), 63–69.
- [3] Permata Sari, N. M., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Pendapatan Asli Pemerintah Daerah. *E-Journal Manajemen*, 8(8), 4759–4787.
- [4] Visualisasi Data APBD (2019). *Tabel Statistik Realisasi Pendapatan 2017*. [online]. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> [22 September 2019]
- [5] Ayu Puspita, P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>
- [6] Suranta, S., Bandi, Syafiqurrahman, M., & Perdana, H. D. (2018). Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan , Otonomi Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 144–154. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.671>
- [7] Permata Sari, N. M., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Pendapatan Asli Pemerintah Daerah. *E-Journal Manajemen*, 8(8), 4759–4787
- [8] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
- [9] Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- [10] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah